

# **PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL**

## **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2023**

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi MS, M.H. Kuala Tungkal

Tanjung Jabung Barat - Jambi 36551

Telp. 074221082 Fax. 074221082

e-mail : [pa-kualatungkal@yahoo.co.id](mailto:pa-kualatungkal@yahoo.co.id)



# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jalan Prof. DR. Sri Soedewi MS, M.H. Kuala Tungkal**

**Telp. 074221082 Fax. 074221082**

**Tanjung Jabung Barat - Jambi 36551**

**e-mail : pa\_kualatungkal@yahoo.co.id**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

---

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kuala Tungkal, 31 Desember 2023  
plt. Kuasa Pengguna Anggaran,

Fenny Yuli Yanti

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran .....	1
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iii
Ringkasan .....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	6
II. Neraca .....	8
III. Laporan Operasional .....	11
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	13
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	15
A. Penjelasan Umum .....	15
A.1. Dasar Hukum.....	15
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL.....	16
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	18
A.4. Basis Akuntansi .....	18
A.5. Dasar Pengukuran .....	18
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	19
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	26
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah .....	26
B.2. Belanja.....	27

# *DAFTAR TABEL*

# Daftar Tabel dan Lampiran

---

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan 2022 .....	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2023 dan 2022 .....	2
Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2023 .....	26
Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2023 dan 2022 .....	26
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023 dan 2022 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2023 dan 2022 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

# Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL

Jln. Prof. Dr. Sri Soedewi MS, S.H. – Kuala Tungkal 36551

Telp. 074221082 Fax. 074221082 e-mail : info@pa-KUALA TUNGKAL.go.id

## Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kuala Tungkal, 31 Desember 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,



Fenny Yuli Yanti

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.185.575,- atau mencapai 30,42 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp909.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp4.278.083.418,- atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp4.318.288.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan 2022**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	909.000	1.185.575	30,42	1.160.350
Belanja Negara	4.318.288.000	4.278.083.418	99	3.834.317.626

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2023 dan 2022.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp7.204.930.238 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.132.032 Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp6.992.303.495 Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya) Rp7.161.298.206 Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp42.500.000.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp891.102,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp891.102,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp7.204.039.136, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp7.204.039.136, dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp0.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2023 dan 2022**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2023	2022	Rp	%
<b>Aset</b>				
Aset Lancar	1.132.032	4.420.437	(3.288.405)	(74.39)
Aset Tetap	7.161.298.206	7.085.644.330	75.653.876	1.07
Aset Lainnya	42.500.000	0	42.500.0000	0,00
<b>Jumlah Aset</b>	<b>7.204.930.238</b>	<b>7.090.064.767</b>	<b>114.865.471</b>	<b>1.62</b>
<b>Kewajiban</b>				
Kewajiban Jangka Pendek	891.102	2.290.870	(1.399.768)	(61.10)
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>891.102</b>	<b>2.290.870</b>	<b>(1.399.768)</b>	<b>(61.10)</b>
<b>Ekuitas Dana</b>				
Ekuitas Dana Lancar	7.204.039.136	7.087.773.897	116.265.239	1.64
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>6.778.873.642</b>	<b>7.087.773.897</b>	<b>116.265.239</b>	<b>1.64</b>

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	7.019.869.623	7.090.064.767	(70.195.144)	(0.99)
-----------------------------------	---------------	---------------	--------------	--------

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.185.575, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp4.277.564.837 sehingga terdapat (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp4.276.379.262) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0 dan surplus(defisit) sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp4.276.379.262)

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal adalah sebesar Rp7.087.773.897 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp(Rp4.276.379.262) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp13.327.908 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.379.316.593 sehingga Ekuitas entitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp7.204.039.136.

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2023 , nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

# *I. LRA PERBANDINGAN*



# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 2022**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	TA 2023			TA 2022
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	909.000	1,132,032	130,42	4,420,437
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>909.000</b>	<b>1,132,032</b>	<b>130,42</b>	<b>4,420,437</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	2,709,266,000	2,673,653,571	99	2,540,605,819
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1,252,472,000	1,247,879,847	99	1,233,770,657
3.	Belanja Modal	B.2.3.	356,550,000	356,550,000	100	59,941,150
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>4.318.288.000</b>	<b>4,278,083,418</b>	<b>99</b>	<b>3,834,317,626</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL**  
**NERACA**  
**PER 31 Desember 2023 dan 2022**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
C.1			
<b>Kas dan Bank</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 2.	0	1.114.600
Piutang Bukan Pajak	C.1. 3.	0	0
<b>PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)</b>	<b>C.1. 4.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Persediaan	C.1. 5.	1.132.032	3.305.837
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>1.132.032</b>	<b>4.420.437</b>
<b>Aset Tetap</b>			
C.2			
Tanah	C.2. 1.	1,038,250,000	1.038.250.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	3,366,783,678	2.953.183.678
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	6,043,631,967	5.840.905.167
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	248.642.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	64,250,209	64.250.209
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(3,351,617,648)	(3.059.586.742)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>7,161,298,206</b>	<b>7,085,644,330</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
C.3			
Aset Tak Berwujud	C.3.1	66,500,000	66,500,000
Aset Lain-lain	C.3.2	38,957,600	38,957,600
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset lainnya	C.3.3	(62,957,600)	(105,457,600)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>42.500.000</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>7,204,930,238</b>	<b>7,090,064,767</b>

### KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek		C.4	
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	891.102	1.176.270
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4. 2.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.4. 3.	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4. 4.	0	1.114.600
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		891.102	2.290.870
Jumlah Kewajiban		891.102	2.290.870
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar		C.5	
Jumlah Ekuitas		7,204,039,136	7.087.773.897
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		7,204,930,238	7.090.064.767

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

## III. Laporan Operasional

**PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 31 Desember 2023 dan 2022**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	1,185,575	1,160,350
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>1,185,575</b>	<b>1,160,350</b>
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	2,673,653,571	2,531,458,819
Beban Persediaan	D. 3	25,704,482	24,875,005
Beban Barang dan Jasa	D. 4	758,375,282	764,927,479
Beban Pemeliharaan	D. 5	387,816,003	372,784,051
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	77,872,717	67,950,000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bunga	D. 8	0	0
Beban Subsidi	D. 9	0	0
Beban Hibah	D. 10	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 11	0	46.340
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 12	354,142,782	359,996,436
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 13	0	0
Beban Transfer	D. 14	0	0
Beban Lain-lain	D. 15	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>4,277,564,837</b>	<b>4,121,991,790</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(4,276,379,262)</b>	<b>(4,120,831,440)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
<b>Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>	D. 16	<b>0</b>	<b>(308,908,888)</b>

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	308,908,888
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	(308.908.888)
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(4,276,379,262)	(4,429,740,328)
Pos Luar Biasa	D. 13	
Beban Luar Biasa	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(4,276,379,262)	(4,429,740,328)

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 31 Desember 2023 dan 2022**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas Awal	E. 1	7,087,773,897	7,360,853,449
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(4,276,379,262)	(4,429,740,328)
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar</b>			
<b>Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas</b>			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E. 4	42,500,000	0
Selisih Revaluasi Aset	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	(29,172,092)	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	4,379,316,593	4,156,660,776
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	116,265,239	(273,079,552)
Ekuitas Akhir		7,204,039,136	7,087,773,897

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



# V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL

Visi Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL adalah Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL dalam membuat visi dan misinya. Visi Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL bersumber dari Visi

Mahkamah Agung RI adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL yang Agung".

Misi Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL adalah Misi Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL adalah :

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara berkeadilan.
2. Menerapkan manajemen peradilan secara sistematis.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber dana secara profesional, transparan, dan akuntabel.
4. Meningkatkan kualitas pengawasan internal secara konsisten dan konsekuen.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas, profesionalisme dan karir pegawai Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL di bidang tugasnya masing-masing yang didukung oleh materi-materi pendidikan dan pelatihan yang relevan untuk memenuhi kebutuhan lembaga peradilan sesuai dengan posisi, peran dan kewenangan aparatur dan untuk peningkatan produktivitas, daya saing nasional serta mampu menjawab tantangan global (indikator persentase peningkatan SDM).
- b. Meningkatnya minat dan kemauan pegawai Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL untuk menambah ilmu pengetahuan dengan mengoptimalkan fungsi perpustakaan dan pemanfaatan media massa yang diiringi dengan peningkatan penyelenggaraan keputakaan, kearsipan dan dokumentasi (indikator persentase peningkatan SDM).
- c. Meningkatnya etos kerja pegawai Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL sehingga berorientasi kepada hasil (indikator persentase peningkatan etos kerja).
- d. Meningkatnya keseragaman pola administrasi dan manajemen peradilan di semua lingkungan peradilan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai tertib administrasi perkara di pengadilan agama (indikator persentase peningkatan administrasi manajemen peradilan).
- e. Meningkatnya akurasi data dan statistik, mulai dari penyusunan, pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data, termasuk pemanfaatan teknologi dengan penerapan aplikasi yang lebih canggih (indikator persentase peningkatan akurasi data statistik)

- f. Meningkatnya penerapan teknologi informasi di bidang administrasi perkara sesuai dengan perkembangan teknologi informasi agar selalu up to date (indikator persentase optimalisasi SIADPA Plus).

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

---

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### A.4. Basis Akuntansi

---

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### A.5. Dasar Pengukuran

---

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL adalah sebagai berikut:

### (1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(3.) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **(4.) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## (5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%



Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai

dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonog87ram.	50

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## **(6.) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
  - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
  - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

## **(7.) Ekuitas**

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah :  
Rp605.400*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 605.400 atau mencapai 67 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 909.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2023**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan bangunan	909.000	1.185.575	130.42
2.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	0	0	0,00
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
<b>Total Pendapatan</b>		<b>909.000</b>	<b>1.185.575</b>	<b>130.42</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.25.225,- atau 2.17 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena: Peningkatan Pendapatan Sewa Tanah, gedung dan Bangunan .

Perbandingan realisasi PNBP TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2023 dan 2022**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	2022	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	0	0	0
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.185.575	1.160.350	25.225	2.17

3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
<b>Total Pendapatan</b>		<b>1.185.575</b>	<b>1.160.350</b>	<b>25.225</b>	<b>2.17</b>

## B.2. Belanja

*Realisasi  
Belanja  
Negara : Rp  
4,278,083,418*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL per 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp4.278.083.418 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp0, atau sebesar 99% dari anggaran senilai Rp4.318.288,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2,709,266,000	2,673,653,571	99
Belanja Barang	1,252,472,000	1,247,879,847	99
Belanja Modal	356,550,000	356,550,000	100
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>4.318.288.000</b>	<b>4,278,083,418</b>	<b>99</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>4.318.288.000</b>	<b>4,278,083,418</b>	<b>99</b>

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp443.765.792 atau sebesar 11,57 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena bertambahnya anggaran belanja operasional dan belanja Modal pada Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL.

Perbandingan realisasi belanja TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	2,673,653,571	2,540,605,819	133.047.752	5,23
Belanja Barang	1,247,879,847	1,233,770,657	14.109.190	11,39
Belanja Modal	356,550,000	59,941,150	296.608.850	494,8
<b>Total Belanja</b>	<b>4,278,083,418</b>	<b>3,834,317,626</b>	<b>443.765.792</b>	<b>11,57</b>

### B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja  
Pegawai : Rp  
2.673.653.571

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp2.673.653.571 dan Rp2.540.605.819.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,23% dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 ada beberapa pegawai dan hakim pada Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL yang mengalami kenaikan pangkat dan KGB.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	992,740,120	981,853,540	10.886.580	1,10
Belanja Pembulatan Gaji PNS	12,530	14,907	(2.377)	(15,94)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	83,683,870	81,435,410	2.248.460	2,76
Belanja Tunj. Anak PNS	23,403,912	23,400,138	3.774	0,016
Belanja Tunj. Struktural PNS	34,780,000	19,960,000	14.820.000	74,24
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,180,400,000	1,075,675,000	104.725.000	9,73
Belanja Tunj. PPh PNS	126,288,849	101,956,170	24.332.679	23,86
Belanja Tunj. Beras PNS	61,267,320	62,208,780	(941.460)	(1,51)

Belanja Uang Makan PNS	163,447,000	185,597,000	(22.150.000)	(11,93)
Belanja Tunj. Umum PNS	7,630,000	8,755,000	(1.125.000)	(12,84)
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>2,673,653,601</b>	<b>2,540,855,945</b>	<b>132.797.656</b>	<b>5,22</b>
Pengembalian Belanja	(0)	(0)	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>2,673,653,601</b>	<b>2,540,855,945</b>	<b>132.797.656</b>	<b>5,22</b>

### B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi Belanja  
Barang :Rp  
1,243,349,847*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp1.234.349.847 dan Rp1,228,625,057.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	588,287,491	556,543,120	31,744,371	28,58
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0	100
Belanja Jasa	182,377,903	238,578,289	(56,200,386)	-58,04
Belanja Pemeliharaan	385,856,736	365,553,648	20,303,088	48,86
Belanja Perjalanan Dinas	77,872,717	67,950,000	5,769,790	35,33
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>1,234,349,847</b>	<b>1,228,625,057</b>	<b>5,769,790</b>	<b>27,75</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>1,234,349,847</b>	<b>1,228,625,057</b>	<b>5,769,790</b>	<b>27,75</b>

### B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi Belanja  
Modal:  
Rp365.550.000*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp365.550.000 dan Rp59.941.150



Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	296,550,000	29,941,150	266,608,850	890
Belanja Modal Gedung & Bangunan	60,000,000	30,000,000	30,000,000	50
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>356,550,000</b>	<b>59,941,150</b>	<b>296,608,850</b>	<b>494</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>356,550,000</b>	<b>59,941,150</b>	<b>296,608,850</b>	<b>494</b>

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:  
Rp1.132.032

### Aset Lancar

#### C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran:  
Rp0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2023	31 Desember TA 2021
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp0	Rp0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>

### C.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja  
Dibayar di  
Muka: Rp0*

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

#### Rincian Belanja Dibayar di Muka (dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2023	31 Desember TA 2022
	Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	Rp0	Rp0
	Jumlah	Rp0	Rp0

### C.3. Persediaan

*Persediaan:  
Rp1.132.032*

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.132.032 dan Rp3.305.837. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

#### Persediaan per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Barang Konsumsi	1,132,032	3,305,837
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0

7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
<b>Total</b>		<b>11,132,032</b>	<b>3,305,837</b>

#### C.14. Tanah

*Tanah: Rp  
1.038.250.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.038.250.000 dan Rp1.038.250.000.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	1.038.250.000
Mutasi Tambah	
...	0
Mutasi Kurang	
...	..
Saldo per 31 Desember 2023	1.038.250.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	
Nilai Buku 31 Desember 2023	1.038.250.000

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

#### C.15. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan  
Mesin : Rp  
3,366,783,678*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp3,366,783,678 dan Rp2,953,183,678.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	2,953,183,678
<b>Mutasi Tambah</b>	
...	413,600,000
<b>Mutasi Kurang</b>	
...	0
Saldo per 31 Desember 2023	3,366,783,678
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku 31 Desember 2023	3,366,783,678

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### C.16. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan :*  
Rp6,043,631,967

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp6,043,631,967 dan Rp5,840,905,167.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	5,840,905,167
<b>Mutasi Tambah</b>	
...	202,726,000
<b>Mutasi Kurang</b>	
...	0
Saldo per 31 Desember 2023	6,043,631,967
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku 31 Desember 2023	6,043,631,967

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### C.17. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan , Irigasi,  
dan Jaringan : Rp0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp248,642,000.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	284.642.000
<b>Mutasi Tambah</b>	
...	0
<b>Mutasi Kurang</b>	
...	248,642,000
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku 31 Desember 2023	0

### C.18. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya:  
Rp64.250.209*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp64.250.209 dan Rp64.250.209.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	64.250.209
<b>Mutasi Tambah</b>	
...	0
<b>Mutasi Kurang</b>	0
Saldo per 31 Desember 2023	64.250.209
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku 31 Desember 2023	64.250.209

### C.19. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam  
Pengerjaan : Rp 0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
tetap :  
-Rp.3.351.617.648*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp (3,351,617,648) dan Rp (3,059,586,724)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3,057,733,678	(2,485,656,729)	2,218,524,246
2	Gedung dan Bangunan	5,840,905,167	(665,905,630)	5,840,905,167
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	284,642,000	(105,915,200)	284.642.000
4	Tanah	1,827,360,000	(2,485,656,729)	1.827.360.000
5	Aset Tetap Lainnya	64,250,209	0	64.250.209
	Jumlah	11,074,891,054	(5,743,134,288)	5,331,756,766

### C.21. Aset tak berwujud

*Aset tak Berwujud :  
Rp66.500.000*

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp66.500.000 dan Rp66.500.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun mutase transaksi ATB per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	66.500.000
<b>Mutasi Tambah</b>	
...	0
<b>Mutasi Kurang</b>	
...	0
Saldo per 31 Desember 2023	66.500.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(66.500.00)
Nilai Buku 31 Desember 2023	0

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp66.500.000 dan Rp66.500.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama tahun 2023.

### C.22. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :  
Rp38.957.600*

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp38.957.600 dan Rp38.957.600 Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2022	38.957.600
<b>Mutasi Tambah</b>	
<b>Mutasi Kurang</b>	
Saldo per 31 Desember 2023	38.957.600

### C.23. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Lainnya :  
Rp(105.547.600)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp(105.547.600) dan Rp(105.547.600). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Aset tak Berwujud	66.500.000	66.500.000
2	Aset Lain-lain	38.957.600	38.957.600
	Nilai perolehan Aset Lainnya	0	0
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

### C.24. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari  
KPPN:  
Rp0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

### C.25. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada  
Pihak Ketiga:  
Rp891,102*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp891,102 dan Rp1.176.270. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) dalam tahun anggaran berjalan.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL per tanggal



pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
01	Utang kepada Pihak Ketiga	891,102	Belanja Yang Masih Harus Dibayar
	Jumlah	891,102	

## C.26. Ekuitas

*Cadangan Piutang:  
Rp7,204,039,136*

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7,204,039,136 dan Rp7,087,773,897. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan PNBp :  
Rp1,185,575*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1,185,575 dan Rp1,160,350. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember TA 2023  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Naik(turun)%
4.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,185,575	1,160,350	2.17
5.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
6.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0
	Total Pendapatan	1,185,575	1,160,350	2.17

## D.2. Beban Pegawai

**Beban Pegawai :**  
**Rp2.673.653.571**

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2,673,653,571 dan Rp2,531,458,819. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022**  
*(dalam satuan Rupiah)*

No.	Uraian	2023	2022	Naik(turun)%
1.	Beban Gaji	2,673,653,571	2,531,458,819	5.61
2.	Beban Tunjangan-tunjangan	0	0	0
3.	Beban Honorarium dan Vakansi	...	...	...
4.	Beban Lembur	...	...	...
	<b>Total</b>	<b>2,673,653,571</b>	<b>2,531,458,819</b>	<b>5.61</b>

## D.3. Beban Persediaan

**Beban Persediaan :**  
**Rp25,704,482**

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp25,704,482 dan Rp24,875,005. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022**  
*(dalam satuan Rupiah)*

No.	Uraian	2023	2022	Naik(turun)%
1.	Beban Persediaan Konsumsi	25,704,482	24,875,005	3,33
2.	Beban Persediaan Strategis untuk Berjaga-jaga	...	...	...

3. Beban Persediaan Lainnya ... ..

Total	25,704,482	24,875,005	3,33
-------	------------	------------	------

## D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa :  
Rp758,375,282*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp758,375,282 dan Rp764,972,479. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)%
Beban Barang dan Jasa	758,375,282	764,972,479	(0.85)
<b>Total Beban Jasa</b>	<b>758,375,282</b>	<b>764,972,479</b>	<b>(0.85)</b>

## D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban  
Pemeliharaan:  
Rp387,816,003*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp387,816,003 dan Rp372,784,051. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	162,538,370	201,908,000	(19.4)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	210,718,366	151,045,648	39,5
Beban Pemeliharaan lainnya	12,600,000	12,600,000	0
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>387,816,003</b>	<b>372,784,051</b>	<b>4.03</b>

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan  
Dinas :  
Rp77,872,717*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp77,872,717 dan Rp67,950.000. Beban tersebut adalah

merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	77,872,717	67,950,000	14.60
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>77,872,717</b>	<b>67,950,000</b>	<b>14.60</b>

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang  
untuk Diserahkan  
kepada Masyarakat  
: Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat  
per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0

Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
--	---	---	---

## D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan Sosial : Rp 0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial  
per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)%
<b>Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Beban Bantuan Sosial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi :  
Rp354,142,782*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp354,142,782 dan Rp359,996,436. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)%
Beban Penyusutan dan	354,142,782	359,996,436	(1.6)

Amortasi

Jumlah Penyusutan	354,142,782	359,996,436	(1.6)
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0
<b>Total Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>354,142,782</b>	<b>359,996,436</b>	<b>(1.6)</b>

## D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Piutang tak Tertagih  
per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0
<b>Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain : Rp0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan

2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Lain-lain**  
per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)%
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0
Peralatan dan Mesin			
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0
Gedung dan Bangunan			
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0
Aset Tetap Lainnya			
<b>Total Beban Lain-lain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan  
Non Operasional :  
Rp0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional**  
per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)%
Surplus/ Defisit Penjualan	0	0	0
Aset Non Lancar			
Surplus/ Defisit Kegiatan Non	0	0	0
Operasional Lainnya			
<b>Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar  
Biasa : Rp*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa  
per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)%
Pendapatan PNB	1,185,575	1,160,350	2.17
Beban Perjalanan Dinas	77,872,717	67,950,000	14.6
Beban Persediaan	25,704,482	24,875,005	3.33
<b>Total Pos Luar Biasa</b>	<b>104,762,774</b>	<b>93,985,355</b>	<b>11.46</b>

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7,087,773,897 dan Rp7,360,853,449

### E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(4,276,379,262) dan Rp(4,429,740,328). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

#### E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

#### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan  
per 31 Desember TA 2023**  
*(dalam satuan Rupiah)*

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
<b>Total Koreksi Nilai Persediaan</b>	<b>0</b>

### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (0) dan (0)

### E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (0) dan (0)

### E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain  
per 31 Desember TA 2023**  
*(dalam satuan Rupiah)*

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

## E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2,250,893,872 dan Rp2,250,893,872.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp.0 sedangkan DKEL sebesar Rp.0.

### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, sebesar Rp0

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	
2	ABC	Barang	

## E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7,204,039,136 dan Rp7,087,773,897

## **F. Pengungkapan Penting Lainnya**

### **F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca**

Selama semester I tahun anggaran 2023, tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca yang dapat mempengaruhi neraca keuangan Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL untuk periode semester I tahun 2023.

### **F.2. Pengungkapan Lain-lain**

#### **F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK**

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan semester lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

#### **F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual**

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **F.2.3. Rekening Pemerintah**

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL adalah:

1. BRI Unit KUALA TUNGKAL A/C 0179-01-000954-30-7 a.n. RPL 143 PA KUALA TUNGKAL UNTUK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.26.201.000
2. BRI UNIT KUALA TUNGKAL A/C 653244022051000 a.n. BPG 143 PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0.
3. BRI UNIT KUALA TUNGKAL A/C 651544022061000 a.n. BPG 143 PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0.

#### **F.2.4. Revisi DIPA**

---

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :  
Selama tahun 2023, Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL melakukan 11 (sebelas) kali revisi yaitu revisi Halaman III (Rencana Penarikan Dana), serta revisi POK berupa pergeseran anggaran.

#### **F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

---

Selama tahun 2023, Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL tidak pernah melakukan Ralat SPM, SP2D, SSBP dan SSPB.

#### **F.2.6. Catatan Penting Lainnya**

---

# **PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2023**

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi MS, M.H. Kuala Tungkal

Tanjung Jabung Barat - Jambi 36551

Telp. 074221082 Fax. 074221082

e-mail : [pa-kualatungkal@yahoo.co.id](mailto:pa-kualatungkal@yahoo.co.id)



# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023**

**BAGIAN ANGGARAN 005.04**

**BADAN PERADILAN AGAMA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jalan Prof. DR. Sri Soedewi MS, M.H. Kuala Tungkal**

**Telp. 074221082 Fax. 074221082**

**Tanjung Jabung Barat - Jambi 36551**

**e-mail : pa\_kualatungkal@yahoo.co.id**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

---

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kuala Tungkal, 31 Desember 2023  
Plt. Kuasa Pengguna Anggaran,

Fenny Yuli Yanti, S.H.



# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran .....	1
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iii
Ringkasan .....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	6
II. Neraca .....	8
III. Laporan Operasional .....	11
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	13
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	15
A. Penjelasan Umum .....	15
A.1. Dasar Hukum.....	15
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL.....	16
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	18
A.4. Basis Akuntansi .....	18
A.5. Dasar Pengukuran.....	18
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	19
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	26
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah .....	26
B.2. Belanja.....	27

# *DAFTAR TABEL*

# Daftar Tabel dan Lampiran

---

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan 2022 .....	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2023 dan 2022 .....	2
Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2023 .....	26
Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2023 dan 2022 .....	26
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023 .....	27
Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023 .....	28
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023 dan 2022 .....	28
Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2023 dan 2022 .....	29

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

# Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL

Jln. Prof. Dr. Sri Soedewi MS, S.H. – Kuala Tungkal 36551

Telp. 074221082 Fax. 074221082 e-mail : info@pa-KUALA TUNGKAL.go.id


## Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kuala Tungkal, 31 Desember 2023

Plt. Kuasa Pengguna Anggaran,

  
Fenny Yuli Yanti, S.H.

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode Juli 2023 s.d. 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 41.462.000 atau mencapai 47 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp87.779.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar 96.350.000 atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 96.750.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan 2022**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	87.779.000	41.462.000	47	57.669.500
Belanja Negara	96.750.000	96.350.000	100	79.650.000



## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2023 dan 2022.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 3.646.410, yang terdiri dari: Persediaan Rp. 3.646.410, Aset Lancar sebesar Rp0; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp0,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp0,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp 3.646.410, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 3.646.410, dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp0.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2023 dan 2022**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2023	2022	Rp	%
<b>Aset Lancar</b>				
Persediaan	3.646.410	2.697.300	(949.110)	-0.261
Aset Tetap	0	0	0	0,00
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Aset</b>	<b>3.646.410</b>	<b>2.697.300</b>	<b>(949.110)</b>	<b>-0.261</b>
<b>Kewajiban</b>				
Kewajiban Jangka Pendek	0	0	0	0
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ekuitas Dana</b>				
Ekuitas Dana Lancar	3.646.410	2.697.300	(949.110)	-0.261
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	<b>3.646.410</b>	<b>2.697.300</b>	<b>(949.110)</b>	<b>-0.261</b>

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 41.462.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 96.868.800 sehingga terdapat (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 55.406.800) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0 dan surplus(defisit) sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp 55.406.900)

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.697.300 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp 55.406.800) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 56.355.910 Kenaikan/Penurunan Ekuitas Rp 949.110 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 3.646.410.

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2023 , nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 2022**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	TA 2023			TA 2022
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	87.779.000	41.462.000	47	57.699.500
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>87.779.000</b>	<b>41.462.000</b>	<b>47</b>	<b>57.699.500</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	96.750.000	96.350.000	100	79.650.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>96.750.000</b>	<b>96.350.000</b>	<b>100</b>	<b>79.650.000</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL**  
**NERACA**  
**PER 31 Desember 2023 dan 2022**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>ASET</b>			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	3.646,410	2.697.300
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>3.646,410</b>	<b>2.697.300</b>
Aset Tetap			
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5. 2.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 3.	0	0
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EKUITAS</b>			

Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Jumlah Ekuitas Dana		3,646,410	2.697.300
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		3,646,410	2.697.300

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

## III. Laporan Operasional

**PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 31 Desember 2023 dan 2022**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	41.462.000	57.699.500
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>41.462.000</b>	<b>57.699.500</b>
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	1.768.800	1.583.182
Beban Barang dan Jasa	D. 4	53.110.000	49.660.000
Beban Barang Non Oeprasional	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	41.990.000	28.740.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>96.868.800</b>	<b>79.983.182</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(55.406.800)</b>	<b>(22.283.682)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
<b>D. 12</b>			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	0	0
Pos Luar Biasa	D. 13	
Beban Luar Biasa	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(55.406.8000)	(22.283.682)

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 31 Desember 2023 dan 2022**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas Awal	E. 1	2.697.300	1.500.482
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(55.406.800)	(22.283.682)
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar</b>			
<b>Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas</b>			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	56.355.910	23.480.300
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	949.110	2.697.300
Ekuitas Akhir		3.646.410	2.697.300

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

# V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

## **A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL**

Visi Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL adalah Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL dalam membuat visi dan misinya. Visi Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL bersumber dari Visi

Mahkamah Agung RI adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL yang Agung".

Misi Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL adalah Misi Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL adalah :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Kuala Tungkal
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Pimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Kuala Tungkal

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas, profesionalisme dan karir pegawai Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL di bidang tugasnya masing-masing yang didukung oleh materi-materi pendidikan dan pelatihan yang relevan untuk memenuhi kebutuhan lembaga peradilan sesuai dengan posisi, peran dan kewenangan aparatur dan untuk peningkatan produktivitas, daya saing nasional serta mampu menjawab tantangan global (indikator persentase peningkatan SDM).
- b. Meningkatnya minat dan kemauan pegawai Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL untuk menambah ilmu pengetahuan dengan mengoptimalkan fungsi perpustakaan dan pemanfaatan media massa yang diiringi dengan peningkatan penyelenggaraan kepastakaan, kearsipan dan dokumentasi (indikator persentase peningkatan SDM).
- c. Meningkatnya etos kerja pegawai Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL sehingga berorientasi kepada hasil (indikator persentase peningkatan etos kerja).
- d. Meningkatnya keseragaman pola administrasi dan manajemen peradilan di semua lingkungan peradilan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai tertib administrasi perkara di pengadilan agama (indikator persentase peningkatan administrasi manajemen peradilan).
- e. Meningkatnya akurasi data dan statistik, mulai dari penyusunan, pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data, termasuk pemanfaatan teknologi dengan penerapan aplikasi yang lebih canggih (indikator persentase peningkatan akurasi data statistik)



- f. Meningkatnya penerapan teknologi informasi di bidang administrasi perkara sesuai dengan perkembangan teknologi informasi agar selalu up to date (indikator persentase optimalisasi SIADPA Plus).

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL adalah sebagai berikut:

### (1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(3.) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **(4.) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## (5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai

dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<b>Software Komputer</b>	4
<b>Franchise</b>	5
<b>Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.</b>	10
<b>Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.</b>	20
<b>Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan</b>	25
<b>Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.</b>	50

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## **(6.) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
  - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
  - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

## **(7.) Ekuitas**

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah :  
Rp41.462.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 41.462.000 atau mencapai 47 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 87.779.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2023**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	45.529.000	24.897.000	2.229
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	0	0	0,00
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	42.250.000	16.565.000	69.02
<b>Total Pendapatan</b>		<b>87.779.000</b>	<b>41.462.000</b>	<b>47</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.16.237.500,- atau 0.392 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena: penurunan jumlah perkara dan perubahan PNBP.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2023 dan 2022**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	2022	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	24.897.000	34.009.500	9.112.500	0.3667
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	0	0	0	(0)

3.	Pendapatan Ongkos Perkara	16.565.000	23.690.000	7.125.000	0.431
4.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0	0
<b>Total Pendapatan</b>		<b>41.462.000</b>	<b>57.699.500</b>	<b>16.237.500</b>	<b>0.392</b>

## B.2. Belanja

*Realisasi  
Belanja  
Negara : Rp  
96.350.000*

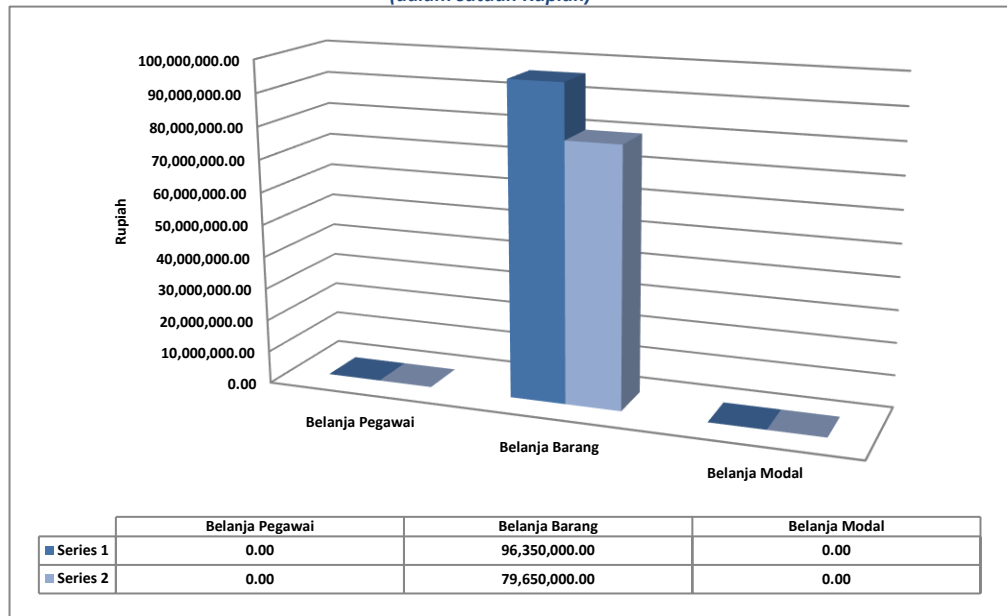
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.96.350.000 atau sebesar 100% dari anggaran senilai Rp.96.750.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023**  
*(dalam satuan Rupiah)*

Uraian	31 Desember 2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	96.750.000	96.350.000	100
Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>96.750.000</b>	<b>96.350.000</b>	<b>100</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023**  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2023 dan 2023

Realisasi Belanja Negara mengalami peningkatan sebesar Rp.16.700.000 atau sebesar (0.174) persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama.

Perbandingan realisasi belanja TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	96.350.000	79.650.000	16.700.000	0.174
Belanja Modal	0	0	0	0,00
<b>Total Belanja</b>	<b>96.350.000</b>	<b>79.650.000</b>	<b>16.700.000</b>	<b>0.174</b>

### B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi  
Belanja Barang  
Rp.96.350.000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp. 96.350.000 dan Rp. 79.650.000

Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami peningkatan sebesar 3 persen

dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2022.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan TA 2022**  
*(dalam satuan Rupiah)*

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Non Operasional	3.010.000	710.000	(2.300.000)	(0.765)
Belanja Barang Operasional	2.100.000	1.150.000	(910.000)	(0.453)
Belanja Jasa	48.000.000	48.000.000	0	0
Belanja Perjalanan Dinas	28.540.000	41.990.000	13.450.000	0.472
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>96.350.000</b>	<b>79.650.000</b>	<b>(16.700.000)</b>	<b>(0.174)</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>96.350.000</b>	<b>79.650.000</b>	<b>(16.700.000)</b>	<b>(0.174)</b>

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:

Rp.0

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah:

**Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Persediaan	0	0
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran:  
Rp.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah:

**Tabel 10 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2023	31 Desember TA 2022
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

### C.1.2. Persediaan

*Persediaan:  
Rp3.646.410*

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp3.646.410 dan Rp. 2.697.300 Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	31 Desember2023	31 Desember 2022
1	Barang Konsumsi	3.646.410	2.697.300
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	<b>Total</b>	<b>3.646.410</b>	<b>2.697.300</b>

## C.2. Aset Tetap

**Aset Tetap : Rp 0** Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 12 Rincian Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

### C.2.1. Tanah

**Tanah: Rp0** Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 13 Rincian Saldo Tanah**

No.	KIB	Luas (m <sup>2</sup> )	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
						0
	<b>Jumlah</b>					<b>0</b>

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan  
Mesin : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku 31 Desember 2023	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku 31 Desember 2023	0



Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

#### C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,  
Irigasi, dan  
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	0
<b>Mutasi Tambah</b>	
<b>Mutasi Kurang</b>	
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku 31 Desember 2023	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

#### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya: Rp 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	0
<b>Mutasi Tambah</b>	
<b>Mutasi Kurang</b>	

Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku 31 Desember 2023	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam  
Pengerjaan : Rp  
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
tetap : Rp 0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 14 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

<i>(dalam satuan Rupiah)</i>				
No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

## C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban  
Jangka Pendek :  
Rp.0*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah:

**Tabel 15. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Uang Muka dari KPPN	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari  
KPPN:  
Rp.0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

## C.6. Ekuitas

*Cadangan  
Piutang:  
Rp3.646.410*

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.646.410 dan Rp2.697.300. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2023 terdapat peningkatan nilai Kewajiban sebesar Rp949.110 dari nilai per 31 Desember TA 2022.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan  
PNbp :  
Rp.41.462.000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 41.462.000 dan Rp 57.699.500. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2023  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
5.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	24.897.000	0
6.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	0	0	0
7.	Pendapatan Ongkos Perkara	0	16.565.000	
8.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>41.462.000</b>	<b>47</b>

### D.2. Beban Pegawai

### D.3. Beban Persediaan

*Beban  
Persediaan : Rp  
1.768.800*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.768.800 dan Rp1.583.182. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	1.768.800	1.583.182	185.618	0.105
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>1.768.800</b>	<b>1.583.182</b>	<b>185.618</b>	<b>0.105</b>

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa :  
Rp53.110.000*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 53.110.000 dan Rp. 49.660.000. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	%
Beban Langganan Daya dan Jasa	0	0	0	0
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	48.000.000	48.000.000	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	5.110.000	1.660.000	3.450.000	0.676
<b>Total Beban Jasa</b>	<b>53.110.000</b>	<b>49.660.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>0.676</b>

#### D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban  
Pemeliharaan:  
Rp.0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31

Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban  
Perjalanan  
Dinas :  
Rp41.990.000

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp41.990.000 dan Rp. 28.740.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	41.990.000	28.740.000	13.250.000	0.316
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar	0	0	0	0
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>41.990.000</b>	<b>28.740.000</b>	<b>13.250.000</b>	<b>0.316</b>

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat :  
Rp.0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis

akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
<b>Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan Sosial : Rp.0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
<b>Total Beban Bantuan Sosial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi :  
Rp.0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Jumlah Penyusutan				
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud				
Beban Penyusutan Aset lain-lain				
Jumlah Amortisasi				
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

## D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban  
Penyisihan  
Piutang tak  
Tertagih : Rp.0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-



masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih  
per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
<b>Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain : Rp.0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain  
per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Lain-lain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan  
Non  
Operasional :  
Rp.0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional  
per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Pendapatan Penyesuaian Persediaan	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
<b>Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar  
Biasa : Rp.0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa  
per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	%
Pendapatan PNBP	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
<b>Total Pos Luar Biasa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.697.300 dan Rp1.500.482

### E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp55.406.800) dan (Rp22.283.682) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

#### E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

#### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan  
per 31 Desember TA 2023  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
<b>Total Koreksi Nilai Persediaan</b>	<b>0</b>

### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

### E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

### E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain  
per 31 Desember TA 2023  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

## E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp56.355.910 dan Rp23.480.500

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
per 30 Juni TA 2023  
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	0
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

#### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023 , DDEL sebesar Rp.0 sedangkan DKEL sebesar Rp.0

#### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 , sebesar Rp0. dari total Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 2023 .

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, adalah Rp.0

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	
2	ABC	Barang	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2016 disajikan pada lampiran

### **E.3. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.646.410 dan Rp2.697.300

## **F. Pengungkapan Penting Lainnya**

### **F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca**

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan semester II TA 2023 ini.

### **F.2. Pengungkapan Lain-lain**

#### **F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK**

---

#### **F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua**

---

Tidak terdapat belanja akrual yang harus dibayarkan pada Laporan Keuangan periode TA 2023 ini.

#### **F.2.3. Rekening Pemerintah**

---

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL adalah:

1. BRI Unit KUALA TUNGKAL A/C 0179-01-000954-30-7 a.n. RPL 143 PA KUALA TUNGKAL UNTUK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.996.000

#### F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

Saldo Awal	Rp. 31.240.000,-	
Penerimaan	Rp. 330.405.000,-	
Biaya Proses ATK/ Pemberkasan		Rp. 25.875.000,-
Biaya Panggilan		Rp. 142.065.000,-
Biaya Penerjemah		Rp 0
Biaya Pemberitahuan		Rp. 46.800.000,-
Biaya Sita		Rp 0
Biaya Pemeriksaan Setempat		Rp 2.400.000,-
Biaya Sumpah		Rp 0
Biaya Pengiriman		Rp. 0
Materai		Rp. 3.730.000,-
PNBP :		
Biaya Pendaftaran		Rp. 10.350.000,-
Biaya Redaksi dan Lainnya		Rp. 3.730.000,-
Biaya Penyampaian Relas		Rp. 9.410.000,-
Pengembalian Panjar Biaya Perkara		Rp. 105.430.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 361.645.000 ,-</b>	<b>Rp. 349.790.000 ,-</b>
<b>Saldo Akhir</b>		<b>Rp. 11.855.000,-</b>
<b>Saldo Bank</b>		<b>Rp. 1.996.000,-</b>
<b>Saldo Kas Tunai</b>		<b>Rp. 9.859.000,-</b>

#### F.2.5.

#### F.2.6. Revisi DIPA

Ada revisi DIPA Sepanjang periode Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL sebanyak 3 kali revisi Halaman III DIPA.

### **F.2.7. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

---

Tidak pernah terjadi Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB sepanjang periode Tahun Anggaran 2023 pada kantor Pengadilan Agama KUALA TUNGKAL

### **F.2.8. Catatan Penting Lainnya**

---